



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201978424, 28 Oktober 2019

## Pencipta

Nama : **Suzy Azeharie, Wulan Purnama Sari,**  
Alamat : Bukit Bogor Raya Blok I 17/18, Bogor, Jawa Barat, 16155  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Suzy Azeharie, Wulan Purnama Sari,**  
Alamat : Bukit Bogor Raya Blok I 17/18, Bogor, 8, 16155  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**  
Judul Ciptaan : **Model Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Sarana Rekonsiliasi  
(Studi Komunikasi Konflik Di Ambon Dan Poso)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Oktober 2019, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000160961

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

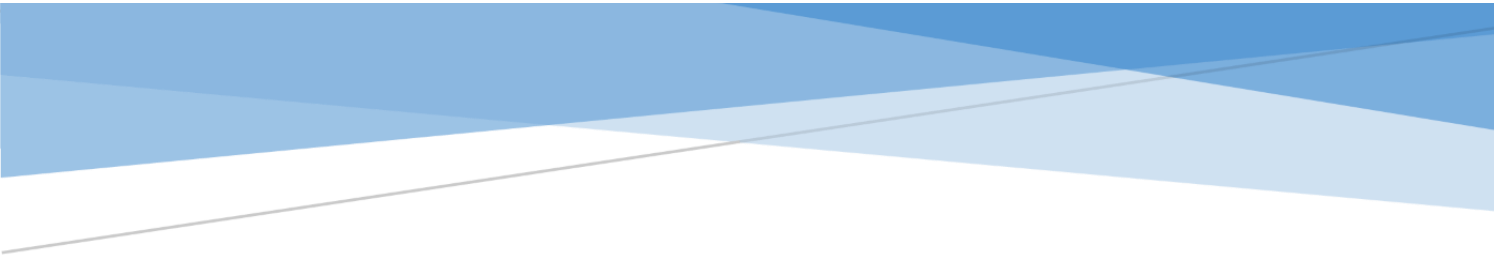
LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Suzy Azeharie	Bukit Bogor Raya Blok I 17/18
2	Wulan Purnama Sari	Jln. Seni Budaya Raya No. 22

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Suzy Azeharie	Bukit Bogor Raya Blok I 17/18
2	Wulan Purnama Sari	Jln. Seni Budaya Raya No. 22 RT/RW 009/005





# MODEL PEMANFAATAN RUANG PUBLIK SEBAGAI SARANA REKONSILIASI

Studi Komunikasi Konflik di Ambon dan Poso

Suzy Azeharie & Wulan Purnama Sari  
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara

## Latar Belakang

Konflik di Ambon terjadi mulai dari tahun 1999 dan kemudian pecah kembali pada tahun 2001 (Aziz, 2011). Konflik ini melibatkan dua kelompok agama, yaitu Islam dan Kristen. Konflik tersebut diperkirakan menelan korban 434 orang (Rahawarin, 2013). Secara historis kedua kelompok ini hidup rukun sebelum terjadinya konflik, Ambon dikenal sebagai “Ambon Manise” yang toleran terhadap agama dan relasi kemanusiaan (Qurtuby, 2017). Sangat umum terjadi perkawinan campur diantara kedua kelompok kepercayaan tersebut, bahkan dikenal kearifan lokal yang mengakar pada masyarakat yang bernama *pela gandong* mengandung arti hubungan kekerabatan meski berbeda agama. Dapat pula diartikan hidup berdampingan dengan penuh tenggang rasa dalam perbedaan agama, tetapi tidak saling mempengaruhi untuk masuk dan memeluk suatu agama tertentu (Bakri, 2015).

Hal ini hilang ketika meletusnya konflik pada tahun 1999, yang menelan banyak korban tidak hanya dalam hal korban jiwa tapi juga kerugian material. Upaya perdamaian dilakukan pada tahun 2001 dengan mempertemukan kedua pihak yang bertikai di Sulawesi Selatan dan menghasilkan perjanjian Mallino II (Krisandi, Setyono, & Utomo, 2013). Adanya perjanjian damai tersebut mendorong masyarakat juga untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian, salah satunya adalah melalui rumah kopi atau kedai kopi. Rumah kopi merupakan salah satu ruang publik yang memiliki peran penting di Ambon. Di rumah kopi tersebut warga Ambon yang berasal dari komunitas Islam dan Kristen serta berbagai etnis dan status sosial bisa bertemu, dari sekedar *hang out* bersama teman-teman kantor, melakukan pembicaraan bisnis bahkan lobi-lobi politik di antara politisi lokal. Pada kasus Ambon ini, kedai kopi merupakan ruang publik atau public sphere yang berfungsi sebagai tempat rekonsiliasi (Ernas, 2016).

Kemudian selain di Ambon, wilayah di Indonesia yang juga dilanda oleh konflik yang bersifat komunal adalah konflik yang terjadi di wilayah Poso. Konflik di Poso pecah hampir bersamaan dengan konflik di Ambon, yaitu mulai dari tahun 1998-2001 dan diakhiri dengan deklarasi Malino I pada tahun 2001 (Ginting, 2016). Di tengah situasi konflik tersebut, rumah kopi juga memainkan peran penting sebagai ruang publik sebagai sarana perdamaian atau rekonsiliasi. Warga Islam dan Kristen duduk disatu meja minum kopi bersama sambil berdiskusi. Warung kopi ini terletak di Kelurahan Bonesompe di Kecamatan Poso Kota, dimiliki oleh

keturunan Tionghoa beragama Kristen yang tinggal di pemukiman muslim (Arya, 2013).

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan diatas terdapat kesamaan antara konflik yang terjadi di Ambon dan Poso, yaitu adanya peran ruang publik (rumah kopi) sebagai sarana rekonsiliasi. Kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran ruang publik sebagai sarana rekonsiliasi di Ambon dan Poso? Dan bagaimana proses terbentuknya ruang publik sebagai sarana rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model dari penerapan ruang publik sebagai sarana rekonsiliasi konflik yang dapat diterapkan di daerah berkonflik lainnya di Indonesia. Tema ini termasuk dalam tema RPJMN tentang sosial humaniora-seni budaya-pendidikan, terkait dengan konflik dalam kaitannya dengan perdamaian, kesatuan dan kerukunan saat ini sedang menjadi isu aktual di masyarakat.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Patton menjelaskan metode fenomenologi berusaha mencari sifat dasar dari suatu fenomena, mencari apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Metode ini berfokus tentang eksplorasi bagaimana manusia menciptakan pengalaman dan mengubah pengalaman tersebut menjadi kesadaran, baik sebagai makna individual maupun makna yang dibagi bersama. Lebih rinci lagi metode ini menjelaskan bagaimana manusia menyadari, menggambarkan, merasakan, menilai, mengingat suatu pengalaman serta bagaimana mereka membicarakan dengan manusia lainnya. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, peneliti harus melakukan wawancara mendalam dengan orang yang mengalami secara langsung fenomena yang ingin diteliti. (Patton, 2002)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengunjung rumah kopi di Ambon dan Poso. Sedangkan objek penelitian adalah komunikasi antara pengunjung dan pengunjung dengan pemilik dalam memanfaatkan ruang publik sebagai sarana rekonsiliasi. Kemudian data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu : wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan juga observasi. Narasumber dalam penelitian ini dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu narasumber dari Ambon dan narasumber dari Poso. Narasumber yang dipilih merupakan tokoh yang terlibat

dalam proses perdamaian saat terjadinya konflik, akademisi yang merupakan pakar di bidang konflik dan ruang publik, serta pemilik ruang publik yang tempatnya dijadikan sarana berkumpul dalam proses penciptaan perdamaian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pengecekan ulang sebagai perwujudan keabsahan data dengan cara melakukan triangulasi dengan konsep teori yang digunakan.

## **Hasil dan Analisis**

### **Ruang Publik Rekonsiliasi Konflik Ambon**

Untuk memahami fenomena integrasi sosial dan usaha membangun perdamaian di Ambon, menurut Saidin Ernas, adalah dengan menggunakan teori Integrasi Sosial. Teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcot Parson. Paradigma ini mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam ekuilibrium. Hal ini menurut Ritzer dan Goodman dari sumber yang sama, tecermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial yaitu, pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Dan kedua, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial. Proses ini mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dengan cara menghubungkan perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor daerah, budaya, agama, kepentingan, dengan mengurangi ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. (Ernas, 2018)

Integrasi sosial dalam sebuah masyarakat demokratik tidak menabukan konflik. karena konflik bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena sosial dan perubahan. Konflik, adalah fenomena sosial yang selalu hadir, inherent omni presence dalam setiap masyarakat. Masyarakat manapun akan menghadapi kemungkinan terjadinya konflik, termasuk di Ambon. Untuk mencapai titik equilibrium dan mengelola konflik tersebut maka berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan. Konflik Ambon menjadikan ruang publik dan ruang domestik tersegregasi. Segregasi bagi masyarakat Ambon bukan suatu fenomena yang baru karena kolonialisme Belanda sudah membelah kota Ambon berdasarkan agama Muslim dan Kristen. Dalam wilayah tersegregasi itu setelah konflik, menurut Jacky

Manuputty, narasi yang ada adalah narasi kalah menang. Orang tidak memiliki tetangga untuk melakukan interaksi lintas agama. Karena itu ruang publik harus dikelola secara maksimal tidak saja sebagai “*physical space*” tapi juga “*interaction space*” yaitu interaksi di ruang publik.

Beberapa ruang publik dan program yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi :

#### 1. *Art for Peace*

Dibentuk tahun 2007 oleh kelompok anak anak muda. Tujuannya adalah menjadikan fotografi sebagai jembatan antara dua komunitas anak muda yang terpisah. Meskipun kemampuan seseorang sebagai fotografer masih terbatas tapi yang diutamakan adalah konten dari foto tersebut. Berbagai keindahan alam Kepulauan Maluku diabadikan kemudian diunggah di media sosial sehingga foto foto tersebut menjadi viral dan mengundang banyak grup fotografer lain. Hanya dalam beberapa bulan puluhan ribu foto yang diunggah fotografer lintas agama. Tujuannya seperti yang dikemukakan oleh Manuputty “*to spread the positive energy to public arena*”

Kegiatan seni lainnya yang dilakukan di ruang publik adalah pembuatan mural yang diorganisir oleh anak anak muda lintas agama. Mereka berjalan kaki keluar masuk wilayah Muslim dan Kristen untuk menggambar mural bergambar tokoh tokoh perdamaian dan kritik sosial. Sehingga di ruang publik terjadi persahabatan yang menjadi jangkar dari perbedaan antara dua komunitas yang berbeda keyakinan. Bagi pecinta sastra maka mereka bahu membahu menulis tiga buah buku puisi tentang Save Aru. Hobi yang dimobilisasi terjadi juga pada pemusik. Para pemusik ini bermain di trotoar pinggir jalan dengan tema musik lingkungan. Anak muda yang bergerak karena mereka lebih kreatif dan leluasa bergerak, keatas maupun menjangkau generasi muda yang umurnya di bawah mereka.

Dari berbagai aktivitas seni ini, anak muda lintas agama bertemu dan membuat kegiatan dan kemudian menjadi satu lingkaran yang bernama “Ambon Bergerak”. Mereka pergi berkegiatan ke pantai atau gunung. Berbincang tentang lingkungan atau hal apa saja, tapi bukan tentang perdamaian. Dari kegiatan itu terciptalah rasa percaya dan jejaring pertemanan.

## 2. Sekolah.

Pasca konflik Ambon, tidak hanya pemukiman yang tersegregasi tapi juga institusi pendidikan seperti sekolah. Setelah konflik karena merasa menjadi out group maka siswa Muslim takut memasuki sekolah Kristen dan siswa Kristen takut masuk ke sekolah Muslim. Sehingga sekolah di daerah Kristen hanya dimasuki siswa Kristen demikian juga sebaliknya. Proses rekonsiliasi dilakukan antara lain dengan membuat sekolah sekolah rekonsiliasi yaitu sekolah tempat pertemuan murid Muslim dan Kristen. Misalnya di SMP Negeri 2 di daerah Nusaniwe, daerah Kristen. Digagaslah ide untuk mengikut sertakan siswa Muslim di sekolah ini. Lalu sekolah Menengah Atas Negeri 7 di Poka yang terletak di daerah pemukiman Muslim, menerima siswa Kristen. Hal yang monumental, menurut Abidin Wakano, adalah ide Pemerintah Daerah untuk mendirikan Sekolah Sekolah Menengah Atas Siwalima, sebuah sekolah asrama yang dalam satu kamar menyatukan siswa Muslim dan siswa Kristen. Sekolah ini menjadi ruang publik tempat siswa membuat berbagai aktivitas seni.

## 3. Program *Live In*.

Program Live In adalah kegiatan menempatkan pendeta Kristen 40 orang setiap tiga bulan sekali dan tinggal satu malam di rumah keluarga Muslim di Ambon. Program ini dimulai pada tahun 2005 dan dirancang karena bila seseorang hadir di domain publik tidak akan membicarakan tentang konflik atau kebencian. Ia akan menggunakan topeng sesuai dengan teori Dramaturgi. Akan tetapi ketika orang tersebut kembali ke ranah domestik maka ia akan kembali dikelilingi oleh orang orang yang marah, dipenuhi dendam serta kebencian, sehingga orang tersebut akan terlarut kembali kedalam atmosphere komunitasnya. Oleh karena itu harus dilakukan intervensi tidak saja di ruang publik namun juga di ruang domestik yaitu dengan program *Live In*.

Kerjasama antar Lembaga Agama di Maluku memainkan peranan penting dalam kegiatan ini. Keluarga Muslim didukung oleh lembaga seperti MUI, NU dan Muhammadiyah. Sementara para pendeta yang akan mengikuti program ini tidak diberitahu mereka akan menginap dimana. Di tempat lain, keluarga Muslim telah dipersiapkan untuk menerima tamunya. Sebelum pergi, kelompok pendeta diberi kertas putih yang harus diisi secara anonim

tentang hal hal yang membuat mereka takut di destinasi area yang dituju dan hal hal yang mereka khawatirkan pada proses adaptasi.

Menurut narasumber Jacky Manuputty, kelompok pendeta memberi ketakutan tertinggi pada rasa tidak percaya. Mereka takut keluarga yang dituju tidak akan menerima, takut dibunuh, takut diracun, tidak tahu bagaimana membuka percakapan dan topik apa yang akan dibahas. Ternyata ketika tiba waktunya untuk berkumpul besok harinya jam 10 pagi, hanya ada dua pendeta yang datang. Kebanyakan pendeta yang lain baru datang di sore dan malam hari diantar keluarga Muslim yang menampung mereka. Mereka berpisah sambil bertangisan. Setelah tinggal bersama satu malam kesadaran baru muncul di kelompok pendeta dan keluarga Muslim sebab mendapatkan kesempatan untuk membicarakan nasib anak anak, tentang masa depan dan berbagai “connecting issues” sebagai manusia.

#### 4. Pasar

Pasca konflik, orang Maluku tidak hanya tersegregasi secara kewilayahan tapi juga secara mental. Sebab salah satu akibat konflik adalah hilangnya kearifan lokal orang Maluku. Kearifan lokal yang hilang itu antara lain adalah *pela gandong*. *Pela* adalah konsep persaudaraan yang tercipta akibat suatu kejadian di masa lampau. Misalnya karena pernah berperang dengan orang lain dan lalu ada yang membantu maka ia diangkat sebagai “*pela*”. Perjanjian itu bisa dilakukan dengan darah masing-masing kepala suku atau raja atau bisa juga dengan melakukan *pela sirih* yaitu memakan daun sirih dicampur pinang secara bersama sama. Sementara *gandong* adalah hubungan persaudaraan berdasarkan garis darah atau saudara. Anak-anak sejak kecil diajar siapa *gandongnya*, siapa leluhurnya. Proses pengajaran itu dapat dilakukan dengan ritual “panas gandong” atau berkumpul kembali yang dibuat secara periodik. Apabila *gandong* yang beragama Muslim membangun mesjid maka *gandong* yang Kristen wajib membantu, demikian juga sebaliknya. Sehingga pembangunan mesjid maupun gereja itu menjadi ruang ruang perjumpaan antar *gandong*.

Akibat konflik maka pupus kearifan lokal sehingga untuk bertemu dengan “*gandong*” yang berbeda agama harus dilakukan secara sembunyi sembunyi. Tapi karena secara konflik dan tersegregasi secara geografis maka tidak ada ruang publik yang tersedia. Sementara kehidupan harus terus berjalan. Saat

itu yang tersedia hanya lapangan sepak bola di Karang Panjang dan lapangan Merdeka tempat anak-anak bermain sepak bola.

Ibu-ibu Muslim di tepi pantai mengawasi dengan membawa ikan ke daerah perbatasan dan ibu-ibu Kristen membawa sayur-sayuran. Karena pemukiman Muslim di tepi pantai maka kelompok ini memiliki akses ke sumber perikanan sementara kelompok Kristen memiliki banyak sayur. Pasar yang digunakan adalah Pasar Bakubayi dan Pasar Mardika. Awalnya menurut salah seorang narasumber Abidin Wakano, diantara ibu-ibu pedagang yang berbeda agama itu belum terjadi transaksi. Pembeli Muslim membeli dagangan dari ibu-penjual Muslim demikian juga dengan pembeli dan penjual Kristen. Apalagi Pusat Komando Jihad kemudian mengeluarkan sebuah larangan untuk ibu-ibu Muslim agar tidak melakukan transaksi dagang dengan orang Kristen. Larangan ini kemudian diprotes ibu-ibu.

Meskipun demikian, perlahan diantara ibu-penjual dan pembeli mulai terjadi saling menyapa disusul transaksi antara pembeli dengan penjual yang berlainan agama. Sejalan dengan berjalannya waktu maka terciptalah “*trust*”, kepercayaan diantara kedua kelompok berbeda agama ini. Aksi ibu-ibu penjual dan pembeli ini kemudian diikuti oleh kegiatan tukang ojek yang mengantarkan penumpang dari satu tempat yang dikuasai kelompok agama tertentu menuju daerah yang dikuasai kelompok agama lain. Misalnya karena lokasi tempat Bank berada di daerah Kristen maka tukang ojek yang mengantarkan penumpang Muslim menghubungi temannya yang Kristen untuk menunggu di daerah perbatasan dan mengawal penumpang tersebut pergi ke Bank. Selain tukang ojek maka tukang becakpun melakukan hal yang sama. Meskipun ketika masa awal hal tersebut dilakukan kerap terjadi pembunuhan pada tukang ojek dan becak, akan tetapi sejalan dengan waktu, terjadi pertemuan yang intens antara tukang ojek dan becak dari dua tempat yang tersegregasi.

##### 5. Kedai Kopi

Kedai kopi digunakan sebagai salah satu tempat yang dipakai ketika melakukan proses rekonsiliasi karena di kedai kopi tidak ada ruang-ruang yang membatasi orang untuk berdialog seperti di ruang formal. Di ruang dialog formal umumnya *rundown* acara sudah disusun, tempat duduk telah

diatur, siapa duduk dimana, siapa yang akan berbicara pertama, siapa membicarakan isu apa dan seterusnya. Sementara di kedai kopi, orang bebas untuk mengekspresikan pendapat dalam bahasa verbal tapi juga dengan menggunakan tanda semiotik. Jadi suasana damai atau peace atmosfer dapat dibangun.

Di Ambon, masyarakat segmen bawahlah yang memulai pendirian kedai kopi di daerah perbatasan. Sebab meski konflik masih berlangsung akan tetapi hidup harus terus berjalan. Orang membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Salah satu kedai kopi dipakai sebagai ruang publik pada masa itu adalah Sibu Sibu yang terletak di Jalan Said Perintah, di Kecamatan Sirimau, dekat dengan Tugu Trikora yang ketika masa konflik dijadikan perbatasan. Sibu Sibu dalam bahasa Maluku berarti “sepoi sepoi”. Pelayan kedai kopinya berpakaian khas Maluku yaitu sarung dan baju cele. Konflik juga menyebabkan segregasi yang terjadi dalam pemanfaatan warung kopi sebagai ruang publik. Warung kopi terbagi antar wilayah dan antar kelompok, dimana orang dari masing-masing kelompok akan pergi ke warung kopi yang berada di wilayah kelompoknya masing-masing. Kemudian juga terdapat kecenderungan bahwa masing-masing kelompok memiliki kekhawatiran dan keengganan untuk pergi ke warung kopi di wilayah yang bukan milik kelompoknya. Walaupun tidak ada larangan secara resmi untuk pergi atau berkunjung ke daerah yang bukan merupakan kelompoknya, namun ada semacam norma di dalam masyarakat bahwa untuk berkunjung ke daerah kelompok lain sebaiknya dilakukan saat siang hari, dan dilakukan bila memiliki undangan dari kenalan yang berasal dari kelompok lain. Oleh karenanya, pengunjung warung kopi kebanyakan terbagi ke dalam kelompok-kelompok, tidak umum bagi kelompok Islam untuk pergi ke warung kopi di wilayah Kristen demikian juga sebaliknya. Terdapat pula perbedaan dalam tampilan fisik warung kopi. Warung kopi di wilayah Islam, cenderung bernuansa modern, sedangkan warung kopi di wilayah Kristen lebih bernuansa tradisional. Hal ini dapat dilihat mulai dari nama warung kopi, desain interior, dan juga musik yang diputar. Sebagai contoh salah satu warung kopi di wilayah Kristen bernama Kafe Sibu-Sibu, kafe tersebut bernuansa tradisional dimulai dari interior, dimana dindingnya dipenuhi gambar artis atau atlet keturunan Maluku, kemudian lagu yang

diputar adalah lagu tradisional Maluku, makanan yang disajikan juga makanan tradisional khas Maluku. Hal tersebut sangat berbeda dengan warung kopi di wilayah Islam yang sangat bernuansa modern, dimana musik yang diputar pun merupakan musik modern, menu makanan pun menyediakan menu makanan barat dan juga tradisional sekaligus, dan juga dilengkapi dengan pendingin ruangan.

Walaupun terjadi segregasi wilayah dan ruang publik akibat dari konflik di Ambon, tetapi tidak mengurangi peran dari ruang publik, seperti warung kopi dalam menjadi pesan perantara damai. Selama masa konflik, warung kopi kerap dijadikan tempat berkumpul antar kedua kelompok dan berdiskusi mengenai jalur yang aman, kondisi di lingkungan masing-masing, dan juga tempat untuk memulai rekonsiliasi paska konflik. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu narasumber Bapak Jacky Manuputty, yang menjelaskan tentang pemanfaatan ruang publik paska konflik yang dijadikan tempat rekonsiliasi dengan bantuan anak-anak muda, dengan mengadakan beragam acara dengan tema perdamaian, mulai dari acara musik, lukisan, puisi, dll.

Dalam ruang publik inilah terjadi interaksi antar kelompok yang dahulu pernah bertikai. Interaksi ini juga menjadi berkembang tidak hanya antar kelompok warga Ambon yang pernah bertikai, tetapi juga dengan wisatawan yang datang ke Ambon. Paska konflik, Ambon menjadi lebih terbuka dan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara mulai berdatangan ke Ambon. Terlebih lagi banyak warga migran Ambon yang berada di Belanda datang berkunjung ke Ambon. (Maradona, 2011)

#### 1. Model Ambon



## **Ruang Publik Rekonsoliasi Konflik Poso**

### **1. Temu Akbar Pemuda Lintas Komunitas dan Penerbitan Komik**

Pada tahun 2004, menurut narasumber, dilaksanakan Temu Akbar Pemuda Lintas Komunitas yang diikuti sekitar 400 orang remaja lintas agama dan diadakan di daerah Siuri, Tentena yang mayoritas dihuni oleh umat Kristiani. Pemilihan lokasi di Tentena memang disengaja sehingga pemuda Muslim berani masuk ke daerah Nasrani. Penyelenggaranya selain Lembaga Swadaya masyarakat juga berbagai organisasi kepemudaan seperti Al Khairat, Muhammadiyah, Pemuda Kristen dan Pemuda Hindu. Di Poso pemeluk agama Hindu adalah nomor tiga terbesar di Poso setelah Kristen dan Islam. Hal tersebut karena tahun 1960an program transmigrasi dari Bali ke Poso didatangkan dari Buleleng dan Tabanan.

Pada temu Akbar Pemuda Lintas Komunitas tersebut peserta diberi kesempatan untuk bertukar cerita, pengalaman dan pandangan mereka kedepan setelah Poso dilanda konflik bernuansa agama. Pada tahun yang sama para pemuda bersepakat mengadakan Pilkada Damai. Pada acara ini pemuda masuk ke pelosok dan berbicara mengenai pentingnya Pemilihan Umum yang damai dan berlangsung lancar. Pentingnya berkampanye untuk kedamaian Pemilu karena Pemilu berbicara soal siapa yang memegang kekuasaan sebab awalnya konflik di Poso dipicu oleh Pemilu yang diadakan tahun 1998. Oleh karena itu hal serupa tidak boleh terulang kembali.

Sebuah komik bergambar “Perjalanan Mencari Sahabat” pun diterbitkan berisi gambar-gambar yang mengangkat kearifan lokal daerah Poso, seperti dongeng tentang mesale atau saling membantu, bergotong royong. Misalnya dalam komik itu digambarkan sebuah keluarga Poso yang sedang membangun rumah dan lalu didatangi para tetangga yang menawarkan bantuan. Penerbitan komik ini diwujudkan oleh USAID karena melihat bahwa saat konflik berdarah terjadi banyak anak-anak usia Sekolah Dasar yang menyaksikan peristiwa berdarah tersebut.

### **2. Kemah Kampung Damai**

Sejumlah pemuda lintas iman dari berbagai wilayah di Poso, Sulawesi Tengah turut serta dalam kegiatan Kemah Kampung Damai Lokakarya Penggerak Perdamaian yang diinisiasikan oleh Paritas Institute bekerjasama dengan Sekretariat Revolusi Mental Kementerian Koordinasi Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan. Selama empat hari yaitu pada 19-22 September 2018, pemuda yang terdiri dari pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas hingga mahasiswa terpilih ini bertemu, tinggal dalam perkemahan dan berbagi kisah ihwal hidup dalam perbedaan. Pengalaman masa lalu yang pahit dan tercatat dalam lembaran hitam sejarah relasi antar masyarakat di Poso dijadikan pelajaran hidup berharga bagi pemuda dalam membangun kebersamaan. Para pemuda ini datang dengan prasangka pada teman yang berbeda atau “*the other*”. Liwat kegiatan Kemah kampung Damai ini para pemuda bersahabat dengan perbedaan bukanlah masalah

### 3. Pasar

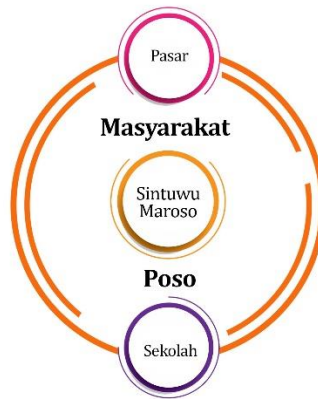
Ketika konflik terjadi musnahlah ruang aman bagi setiap orang. Rumah atau pasar yang dulu menjadi ruang aman sekarang tidak ada sebab Pasar Poso dan Pasar Tentena telah hancur dibom. Oleh karena itu perempuan mulai menciptakan ruang amannya sendiri dengan cara menciptakan ruang publik terbuka yaitu Pasar Lama yang terletak di tengah kota Poso. Di pasar tersebut perempuan pedagang dari berbagai suku seperti dari Bugis, Gorontalo, Pamona dan bermacam kepercayaan seperti Nasrani dan Muslim berkumpul. Perempuan pedagang Nasrani membawa sayur sayuran dan perempuan pedagang Muslim membawa ikan. Awalnya perdagangan dimulai dari barter antara sayur dengan ikan, akan tetapi lama kelamaan terjadi interaksi yang semakin dalam karena kedua kelompok mulai saling mengenal.

Pendekatan negara asing yang masuk sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat pun mulai dipertanyakan. Karena alih alih menggunakan nilai nilai kearifan lokal masyarakat, mereka mengedepankan pendekatan “*peace building*” yang menggunakan metode dan cara baru. Misalnya mengundang pihak pihak yang bertikai dengan membayar mereka setiap kali kedatangan. Padahal, menurut pekerja sosial yang menjadi narasumber penelitian ini Lian Gogali (41 tahun) terdapat budaya asli masyarakat yang seharusnya dikedepankan seperti tradisi saling membantu atau mesale yang masih kental dalam masyarakat. Ada juga tradisi posintuwu yaitu saling membantu memberikan sumbangan bila ada yang memerlukan. Apabila tidak memiliki uang maka menyumbangkan tenaga.

#### 4. Sekolah

Dalam konflik di Poso, sekolah juga dijadikan ruang publik sebagai sarana rekonsiliasi. Setelah terjadi konflik di Poso dengan masuknya bantuan dari banyak pihak didirikan sekolah khusus perempuan. Sekolah ini menjadi ruang bagi para perempuan yang menjadi saksi konflik untuk berbagi cerita dan pengalaman. Sekolah ini menjadi ruang temu sekaligus menjadi ruang untuk para perempuan tersebut untuk bersikap kritis. Sekolah perempuan pertama didirikan pada tahun 2009 di Tentena, dan sekarang jumlahnya telah mencapai 80 sekolah. Sekolah ini awalnya dibangun atas kerjasama dengan The Asian Moeslim Network.

#### 2. Model Poso



### Kesimpulan

1. Konflik Ambon dan Poso menjadikan ruang publik dan ruang domestik tersegregasi. Fasilitas umum seperti pasar, Rumah Sakit, sekolah juga terbelah. Dan dalam wilayah tersegregasi setelah konflik narasi yang ada adalah narasi kalah menang. Orang tidak memiliki tetangga untuk melakukan interaksi lintas agama. Karena itu ruang publik dikelola secara maksimal tidak saja sebagai “*physical space*” tapi juga “*interaction space*” yaitu interaksi di ruang publik.

2. Provinsi Maluku tidak dikenal sebagai salah satu Provinsi penghasil kopi akan tetapi salah satu kekhasan di Maluku adalah banyaknya kedai kopi yang tersebar di berbagai penjuru terutama di kota Ambon. Sementara masyarakat Poso tidak dikenal sebagai masyarakat yang suka berkumpul di kedai kopi.
3. Di kedai kopi di Ambon orang bebas untuk mengekspresikan pendapat dalam bahasa verbal tapi juga dengan menggunakan tanda semiotik. Jadi tercipta suasana damai atau *peace atmosfer*, tidak ada narasi kalah atau menang ketika orang duduk di kedai kopi. Di Ambon, masyarakat segmen bawahlah yang memulai pendirian kedai kopi di daerah perbatasan. Sebab meski konflik masih berlangsung akan tetapi hidup harus terus berjalan. Salah satu kedai kopi yang dipakai sebagai ruang publik pada masa itu adalah Sibu Sibu yang terletak di Jalan Said Perintah, di Kecamatan Sirimau, dekat dengan Tugu Trikora yang ketika masa konflik dijadikan perbatasan. Sibu Sibu dalam bahasa Maluku berarti “sepoi sepoi”. Pelayan kedai kopi tersebut berpakaian khas Maluku yaitu sarung dan baju *cele*.
4. Ketika konflik berlangsung baik di Ambon maupun di Poso, maka musnahlah ruang aman bagi setiap orang. Di Poso, rumah atau pasar yang dulu menjadi ruang aman musnah sebab Pasar Poso dan Pasar Tentena hancur dibom. Oleh karena itu perempuan mulai menciptakan ruang amannya sendiri dengan cara menciptakan ruang publik terbuka yaitu Pasar Lama yang terletak di tengah kota Poso. Di pasar tersebut perempuan pedagang dari berbagai suku seperti dari Bugis, Gorontalo, Pamona dan bermacam kepercayaan seperti Nasrani dan Muslim berkumpul. Perempuan pedagang Nasrani membawa sayur sayuran dan perempuan pedagang Muslim membawa ikan. Awalnya perdagangan dimulai dari barter antara sayur dengan ikan akan tetapi lama kelamaan terjadi interaksi antara kedua kelompok.
5. Sementara di Ambon, ibu-ibu Muslim di tepi pantai mengawali dengan membawa ikan ke daerah perbatasan dan ibu-ibu Kristen membawa sayur sayuran. Karena pemukiman Muslim di tepi pantai maka kelompok ini memiliki akses ke sumber perikanan sementara kelompok Kristen memiliki banyak sayur. Pasar yang digunakan adalah Pasar Bakubayi dan Pasar Mardika. Awalnya diantara ibu-ibu pedagang yang berbeda agama itu belum terjadi transaksi. Pembeli Muslim membeli dagangan dari ibu penjual Muslim demikian juga dengan pembeli dan penjual Kristen. Akan tetapi lama kelamaan diantara ibu

penjual dan pembeli mulai terjadi saling sapa disusul disusul transaksi antara pembeli dengan penjual yang berlainan kepercayaan. Sejalan dengan berjalannya waktu maka terjadilah “*trust*”, kepercayaan diantara kedua kelompok berbeda agama ini.

### Daftar Pustaka

- Arya, S. (2013). Harmoni di Warung Kopi Simpati Poso. Retrieved September 4, 2019, from <https://www.kompasiana.com/sulawesi/552fc19a6ea834c0318b45ba/harmoni-di-warung-kopi-simpatiposo>
- Aziz, Na. A. (2011, October 2). Pertikaian di Ambon Bukan Konflik Agama. *Nasional Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2011/10/02/20394476/Pertikaian.di.Ambon.Bukan.Konflik.Agama>.
- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The POLITICS: Jurnal MAGister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 51–60. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/102761-ID-resolusi-konflik-melalui-pendekatan-kear.pdf>
- Ernas, S. (2016). Architecture of Peace in Ambon: Reading Dynamics of Peace After Ten Years of Conflict. *Al-Albab*, 5(2), 219–236. Retrieved from <https://jurnalaiinpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/504/368>
- Ernas, S. (2018). Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran dari Ambon-Maluku. *International Journal of Islamic Thought*, 14, 99–111. <https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.009>
- Ginting, S. (2016). Neraka Poso: Konflik Islam-Kristen, Warga Keturunan, Santoso, dan Tibo. Retrieved September 4, 2019, from <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo>
- Krisandi, E., Setyono, B., & Utomo, T. C. (2013). Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–11. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/111314-ID-resolusi-konflik-komunal-di-maluku-pasca.pdf>
- Maradona, S. (2011, March 20). 60 Tahun Lika Liku Orang Maluku di Belanda |

Republika Online. *Republika.Co.Id.* Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/20/170982-60-tahun-lika-liku-orang-maluku-di-belanda>

Patton, M. Q. (2002). Qualitative analysis and interpretation. In *Qualitative research & evaluation methods*.

Qurtuby, S. Al. (2017). Belajar Toleransi Agama dari Ambon. Retrieved April 22, 2019, from <https://www.liputan6.com/news/read/3100627/belajar-toleransi-agama-dari-ambon>

Rahawarin, Y. (2013). Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual. *KALAM*, 7(1), 95–120. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/451/2626>